



Judul : Polri Lacak Djoko di Malaysia
Tanggal : Kamis, 23 Juli 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Polri Lacak Djoko di Malaysia

Pimpinan DPR dituding tidak konsisten terkait penerapan tata.

■ HAURA HAFIZAH,
ARIF SATRIO NUGROHO

JAKARTA — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Polri tengah mengupayakan koordinasi dengan Kepolisian Kerajaan Malaysia untuk melacak keberadaan Djoko Sugiantoro Tjandra. Ia yakin, polisi mampu menangkap dan memulangkan terpidana kasus korupsi hak tagih utang Bank Bali yang merugikan keuangan negara Rp 904 miliar tersebut.

"Kami sedang melakukan upaya untuk melakukan penangkapan dan memulangkan tersangka Djoko Tjandra ke Indonesia. Ditunggu saja," kata dia di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

Djoko divonis bersalah dan harus dipenjara selama dua tahun oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2009. Namun, Djoko melaikkan diri ke luar negeri sebelum dieksekusi oleh kejaksaan.

Pada Juni lalu terungkap, Djoko mendaratkan peninjauan kembali kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelusuran lebih lanjut mengungkap dia juga membuat KTP elektronik, paspor, dan berkun-

jung ke Pontianak. Bebasnya Djoko beraktivitas tanpa terdeteksi akhirnya mengungkap adanya kerja sama dengan pejabat terkait.

Argo mengatakan, kepolisian juga memeriksa kuasa hukum Djoko, Andi Putra Kusuma, terkait keberadaan Djoko sejak Selasa (21/7). Menurut Argo, pemeriksaan Andi belum selesai sehingga hasilnya belum bisa diumumkan. "Belum selesai," kata Argo.

Sementara, soal pungutan lebih lanjut kasus sebesarnya Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia, Argo mengaku, masih terus berjalan. Dalam kasus surat jalan Djoko, Polri telah mencopot jabatan tiga jenderal polisi, yaitu Brigjen Prasetyo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo.

Argo mengatakan, pihaknya akan menggelar sidang pelanggaran kode etik setelah Prasetyo selesai dirawat di rumah sakit. Berkas pelanggaran pidana Prasetyo juga telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri. "Pemeriksaan terhadap Prasetyo saat ini dihentikan sementara karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tunggu saja ya," kata Argo.

Sementara itu, rapat dengar pendapat (RDP) yang direncanakan Ko-

mis III DPR dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM belum juga disetujui pimpinan DPR. Pada Selasa (21/7) Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin telah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan menghalangi RDP soal Djoko Tjandra tersebut.

Wakil Ketua MKD Habiburokhan mengatakan, pihaknya akan menerima laporan dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) itu dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan. MKD akan terlebih dulu meneliti identitas pengadu yang masih berlaku serta institusi yang dipakai sebagai pelapor. Kemudian, meneliti Aziz Syamsuddin selaku terlapor berikut bukti-bukti yang disampaikan pelapor.

"Nah verifikasi administrasi tersebut yang dilakukan dalam waktu tiga hari ini, lalu tim sekretariat memberitahukan kepada pelapor apa saja yang kurang dan pelapor harus melengkapi dalam waktu 14 hari," jelas Habiburokhan, kemarin. Setelah itu, MKD baru menggelar rapat pleno menentukan laporan itu memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti dalam persidangan.

Aziz pada Selasa mengatakan, dirinya hanya ingin mengikuti tata tertib DPR yang menyatakan rapat tidak boleh dilakukan dalam masa reses. Ia pun meminta Komisi III tak ngotot menggelar RDP terkait kasus

yang menyita perhatian tersebut. "Jangan kita berdebat masalah administrasi karena saya tidak ingin melanggar tata dan hanya ingin menjalankan tata tertib DPR dan putusan Bamus (badan musyawarah DPR)," ujar Aziz.

Tidak konsisten

Pernyataan Aziz tersebut terpatahkan dengan sendirinya ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pannitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja pada masa reses, Rabu (22/7). Agenda rapat Panja RUU Cipta Kerja itu tak tertera dalam situs resmi DPR. Namun, berdasarkan pantauan, pada pukul 11.40 WIB rapat masih berlangsung dan dipimpin langsung oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

"Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat reses oleh Panja di Baleg DPR, tapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait Djoko Tjandra. Wajar jika kita semua, masyarakat mempertanyakan sikap tersebut," ujar Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian lewat keterangan tertulisnya, Rabu (22/7).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku masih melakukan komunikasi dengan pimpinan Komisi III dan pimpinan DPR lainnya terkait RDP Djoko Tjandra. ■ **nawir**
Arsyad Akbar/febrianto adi saputro **ed:** ilham tirta